

## Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Della Kurniawati<sup>1\*</sup>, Puti Andiny<sup>2</sup>, Yani Rizal<sup>3</sup>, Safuridar Safuridar<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa - Aceh

E-mail : [dellakurniawati312@gmail.com](mailto:dellakurniawati312@gmail.com)<sup>1</sup>, [putiandiny@unsam.ac.id](mailto:putiandiny@unsam.ac.id)<sup>2</sup>, [yanirizal@unsam.ac.id](mailto:yanirizal@unsam.ac.id)<sup>3</sup>, [safuridar@unsam.ac.id](mailto:safuridar@unsam.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi Penulis : [dellakurniawati312@gmail.com](mailto:dellakurniawati312@gmail.com)\*

**Abstract.** Poverty is a major problem that occurs in every country and region including Aceh Province. According to the Central Bureau of Statistics (BPS) report in 2023, Aceh Province ranked first with the highest poverty rate when compared to other regions on the island of Sumatra, Indonesia. This study aims to determine the effect of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) on the poverty rate in Aceh Province. The data used is secondary data and is quantitative data. The data uses time series data from 2011-2023, namely for 13 years obtained from BPS. The results showed that DAU has a *t*-statistic value of 3.198397 with a probability significance value of 0.0095 which is  $<0.05$ , it can be concluded that DAU has a significant effect on the poverty rate. DAK has a *t*-statistic value of -2.428359 with a probability significance value of 0.0355 where  $<0.05$ , it can be concluded that DAK has a negative effect on the poverty rate.

**Keywords:** Poverty, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK)

**Abstrak.** Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang terjadi di setiap Negara dan daerah termasuk Provinsi Aceh. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 Provinsi Aceh menduduki peringkat pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Sumatera, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data skunder dan merupakan data kuantitatif. Data tersebut menggunakan data *time series* tahun 2011-2023 yaitu selama 13 tahun yang diperoleh dari BPS Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *software eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki nilai *t*-statistic sebesar 3,198397 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0,0095 dimana  $<0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. DAK memiliki nilai *t*-statistic sebesar -2,428359 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0,0355 dimana  $<0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci :** Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

### 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan sebagai fenomena yang nyata dan berkembang dalam kehidupan masyarakat telah menjadi pusat perhatian banyak pihak pada masa sekarang. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas kualitas hidup yang tercermin dari kurangnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah yang menjadi salah satu indikator kemiskinan (Kadafi & Murtala, 2020). Kemiskinan terjadi karena sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga mencapai taraf hidup yang dianggap layak secara manusiawi. Keadaan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan menjadi rendah. Siklus kemiskinan terus berulang karena penghasilan yang rendah membuat mereka sulit

mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan nutrisi yang memadai. Akibatnya kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik menjadi rendah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas (Kurniawan, 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang terjadi di setiap Negara dan daerah termasuk Provinsi Aceh. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 Provinsi Aceh menduduki peringkat pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Sumatera, Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana setiap tahunnya pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk merancang program pembangunan yang berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan (Tassya & Nailufar, 2024).

Berikut ini merupakan Persentase tingkat kemiskinan Tertinggi di Pulau Sumatera, Indonesia tahun 2023.

**Tabel 1.**  
**Persentase Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Pulau Sumatera, Indonesia Tahun 2023**

No.	Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)
1.	Aceh	14,45
2.	Bengkulu	14,04
3.	Sumatera Selatan	11,78
4.	Lampung	11,11
5.	Sumatera Utara	8,15
6.	Jambi	7,58
7.	Riau	6,68
8.	Sumatera Barat	5,95
9.	Kepulauan Riau	5,69
10.	Bangka Belitung	4,52

*Sumber : BPS, 2023*

Berdasarkan pada tabel 1. dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Aceh menduduki peringkat pertama sebesar 14,45%. Provinsi Bengkulu menduduki peringkat kedua penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase sebesar 14,04%. Di provinsi Sumatera Selatan persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,78%, sementara di Provinsi Lampung sebesar 11,11%. Provinsi Sumatera Utara dan Jambi masing-masing tercatat persentase penduduk miskin sebesar 8,15% dan 7,58%. Di Provinsi Riau persentase penduduk miskin mencapai 6,68%, disusul oleh Provinsi Sumatera Barat dengan angka sebesar 5,95% dan Kepulauan Riau sebesar 5,69%. Persentase penduduk miskin terendah di Sumatera berada di Kepulauan Bangka Belitung dengan angka sebesar 4,52%.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran (Balqis & Suriani, 2021).

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh tingginya angka penyakit dimasyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama karena biaya pengobatan yang mahal. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan elemen penting yang harus ada di setiap wilayah. Jumlah fasilitas kesehatan yang memadai di suatu wilayah secara tidak langsung mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat (Ismail & Hakim, 2014). Salah satu faktor penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah pengelolaan dana perimbangan yang efektif dan efisien dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat (Tassya & Nailufar, 2024). Oleh karena itu, kompenan dana perimbangan menjadi anggaran yang sangat penting karena alokasinya yang signifikan dan terus meningkat setiap tahunnya, serta berperan sebagai pendorong utama dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah. Jika anggaran ini dikelola secara optimal, masalah kemiskinan dapat diatasi dengan cepat.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dinyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan di alokasikan kepada daerah untuk mendukung pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara umum, perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, serta kondisi masing-masing daerah. Dalam era desentralisasi atau otonomi daerah, wilayah yang diberikan status menerima tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Salindeho, 2016). Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam mendukung proses pembangunan, terutama dalam menjaga dan memastikan tercapainya standar pelayanan publik di daerah. Besarnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dimasing-masing daerah, di mana daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan menerima transfer DAU yang lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Salindeho, 2016). Dana

Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana fisik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan . ketika penerimaan DAK tinggi, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana upaya penanggulangan kemiskinan juga semakin efektif.

**Tabel 2.**  
**Realisasi Penerimaan DAU dan DAK Provinsi Aceh**  
**Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) (Rupiah)</b>	<b>Dana Alokasi Khusus ( DAK) ( Rupiah)</b>
2019	2.322.266.506.000,00	1.744.873.155.047,00
2020	1.956.492.796.000,00	1.762.270.401.566,00
2021	1.945.980.616.000,00	1.660.322.392.030,00
2022	1.941.752.249.876,00	965.669.332.329,00
2023	2.015.956.282.000,00	1.107.806.353.811,00

*Sumber : BPS Provinsi Aceh*

Berdasarkan pada tabel 2. dapat dilihat bahwa Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Aceh tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 2.322.266.506.000,00. Kemudian diikuti tahun 2020 Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp. 1.956.492.796.000,00. Untuk tahun 2021 Dana Alokasi Umum mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 1.945.980.616.000,00. Tahun berikutnya yaitu tahun 2022 Dana Alokasi Umum Provinsi Aceh terus mengalami penurunan sebesar Rp 1.941.752.249.876,00. Dan selanjutnya pada tahun 2023 penerimaan Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.015.956.282.000,00.

Berdasarkan pada tabel 2. dapat dilihat bahwa besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Provinsi Aceh mengalami peningkatan dan penurunan. Dimulai dari tahun 2019 Dana Alokasi Khusus yang diterima sebesar Rp. 1.744.873.155.047,00. Pada tahun 2020 Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.762.270.401.566,00. Tahun 2021 Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar Rp. 1.660.322.392.030,00. Kemudian pada tahun 2022 Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh mengalami penurunan kembali yaitu sebesar Rp 965.669.332.329,00. Dan selanjutnya pada tahun 2023 Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.107.806.353.811,00. Realisasi DAU dan DAK Provinsi Aceh mengalami fluktuasi naik turun setiap tahunnya. Terjadinya fluktuasi naik turunnya DAU dan DAK Provinsi Aceh dipengaruhi oleh dana yang di transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh yang disesuaikan naik turunnya penerimaa Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi sosial dan ekonomi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan dapat ditandai dengan rendahnya pendapatan, sehingga kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal tidak terpenuhi dengan memadai (Bagus Santoso & Setyowati, 2023).

Menurut Suryawati dalam (Novita et al., 2022) pada dasarnya definisi kemiskinan dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

Penyebab kemiskinan dari teori lingkaran setan kemiskinan oleh seorang ahli ekonomi bernama Nurkse dari *Vicious Circle of Poverty* yaitu konsep yang mengandaikan suatu konstelasi melingkar dari daya yang cenderung bereaksi antara satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu Negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidakpuasan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (Adawiyah, 2020).

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang diberikan kepada seluruh daerah dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pengeluaran daerah dan didistribusikan menggunakan formula yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yang umumnya menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan yang lebih tinggi menerima porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kaya (Ndraha & Uang, 2018).

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan dengan guna mencapai sasaran prioritas nasional (Dana et al., 2014).

### **3. METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini ialah kajian ekonomi publik yang meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data skunder dan merupakan data kuantitatif. Data tersebut menggunakan data *time series* tahun 2011-2023 yaitu selama 13 tahun yang diperoleh dari BPS Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *softwer eviws 12*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, adapun model regresi berganda yaitu sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Tingkat Kemiskinan

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Dana Alokasi Umum

$X_2$  = Dana Alokasi Khusus

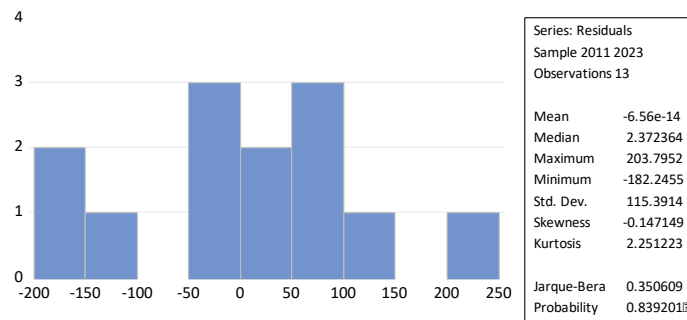
e = Error

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data, dengan menggunakan *softwer eviews 12*. Adapun hasil pengolahan data serta analisisnya yaitu sebagai berikut:

##### 1. Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah eviews 12

Berdasarkan uji *normalitas* tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,350609 dan *Probability* sebesar 0,839201 dengan  $\alpha$  0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *probability* > alpha yaitu 0,839201 > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya variabel DAU, DAK berdistribusi secara normal terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

###### b. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered MF	Centered MF
C	1765.873	1.436729	NA
DAU	11.84509	4.356491	3.229997
DAK	0.051639	3.572570	3.229997

Sumber : Hasil olah eviews 12

Berdasarkan uji *multikolinearitas* tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Centered VIF* variabel DAU, DAK yaitu < 10, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji *multikolineritas* sudah terpenuhi atau tidak ada masalah *multikolinearitas* dalam model tersebut.

###### c. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.221922	Prob. F(5,7)	0.9417
Obs*R-squared	1.778746	Prob. Chi-Square(5)	0.8788
Scaled explained SS	0.658463	Prob. Chi-Square(5)	0.9852

Sumber : Hasil olah eviews 12

Berdasarkan uji *heteroskedastisitas* menunjukkan bahwa nilai *Probability Chi-Square* sebesar  $0,8788 > (\alpha = 0,05)$  sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya bahwa model regresi tidak mengalami gejala *heteroskedastisitas*.

#### d. Uji Autokorelasi

F-statistic	0.435105	Prob. F(2,8)	0.6616
Obs*R-squared	1.275363	Prob. Chi-Square(2)	0.5285

Sumber : Hasil olah eviews 12

Berdasarkan uji *autokorelasi* diketahui bahwa nilai *probability chi-square(2)* yang merupakan nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*, yaitu sebesar 0,5285 dimana  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya tidak ada masalah *autokorelasi*.

**Tabel 3.**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1584.048	42.02229	37.69543	0.0000
DAU	11.00783	3.441670	3.198397	0.0095
DAK	-0.551824	0.227242	-2.428359	0.0355
R-squared	0.509790	Mean dependent var	1653.231	
Adjusted R-squared	0.411748	S.D. dependent var	164.8096	
S.E. of regression	126.4049	Akaike info criterion	12.71603	
Sum squared resid	159782.1	Schwarz criterion	12.84641	
Log likelihood	-79.65421	Hannan-Quinn criter.	12.68923	
F-statistic	5.199716	Durbin-Watson stat	1.190826	
Prob(F-statistic)	0.028308			

Sumber : Hasil olah eviews 12

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji T (Parsial)

Variabel DAU memiliki nilai *t-statistic* sebesar 3,198397 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0,0095 dimana  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel DAK memiliki nilai *t-statistic* sebesar -2,428359 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0,0355 dimana  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.

### b. Uji F (Simultan)

Diketahui nilai *F-statistic* sebesar 5.199716 dengan nilai *probability F-statistic* sebesar 0,028308 dimana  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAU, DAK memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.



### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Diketahui nilai  $R^2$  sebesar 0,509790 artinya variasi seluruh variabel independen yaitu DAU, DAK dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan sebesar 50,979%, sedangkan sisanya sebesar 49,021% (0,49021) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### 4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana alokasi umum menunjukkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh, dengan nilai *probability* sebesar 0,0095 dimana  $<0,05$  dan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 11,00783. Artinya semakin besar realisasi DAU yang diterima maka tingkat kemiskinan cenderung semakin meningkat. Sebaliknya, jika realisasi DAU semakin rendah maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU digunakan untuk kegiatan operasional daerah yang tidak produktif dan menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketika infrastruktur tidak berkembang, maka dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di daerah tersebut. Meskipun DAU seharusnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat, jika penggunaan yang tidak tepat dapat berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan. Namun berdasarkan laporan BPS hingga tahun 2023 Provinsi Aceh masih tercatat sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh disebabkan karena persoalan dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum membuat pemerintah daerah kurang memperhatikan pengelolaan pembangunan dengan baik dan tidak memahami kebutuhan masyarakat secara efektif (Ussa'diyah & Nofrian, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyulianto et al., (2018), Sembiring et al., (2024), Nany et al., (2022), Salindeho (2016), Syahidin & Jalil. M, (2020), dan Rasu et al., (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh Sinaga et al., (2023) dan Nurrizqi et al., (2023) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### 5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh, dengan nilai *probability* sebesar 0,0355 dimana  $<0,05$  dan nilai koefisien yang diperoleh sebesar -551824. Artinya semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan, maka semakin baik pula layanan pemerintah kepada masyarakat yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah

tersebut. Sebaliknya, jika DAK yang dialokasikan semakin kecil maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan cenderung meningkat. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Dana Alokasi Khusus sebagai sumber pendanaan harus memiliki batasan dalam pengalokasiannya yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, DAK telah digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah dengan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pemerataan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik melalui perbaikan infrastruktur di masing-masing daerah dengan memberikan prioritas nasional. Meningkatnya realisasi penerimaan DAK di Provinsi Aceh akan berkontribusi pada peningkatan bantuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan meningkat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dana Alokasi Khusus di Provinsi Aceh di gunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah sejalan dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik mencakup seperti penyediaan air minum, irigasi, pembangunan jalan, sektor perikanan, pariwisata, pendidikan. Sementara itu DAK non fisik dialokasikan untuk mendukung operasional layanan publik daerah seperti dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), tunjangan ASN daerah, dan dana untuk bantuan operasional kesehatan (Terhadap et al., 2024).

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyulianto et al., (2018), Fitriyanti & Handayani, (2020) dan Panggabean et al., (2022) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaludin & Wibowo, (2023) dan Sinaga et al., (2023) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2011-2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai *probability* sebesar 0,0095 dimana  $<0,05$  dan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 11,00783. Artinya semakin besar realisasi DAU yang diterima maka tingkat kemiskinan cenderung semakin tinggi, begitu juga

sebaliknya jika realisasi DAU semakin rendah maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai *probability* sebesar 0,0355 dimana  $<0,05$  dan nilai koefisien yang diperoleh sebesar -551824. Artinya semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan, maka semakin baik pula layanan pemerintah kepada masyarakat yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, Sebaliknya, jika DAK yang dialokasikan semakin kecil maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan cenderung meningkat.
3. Sedangkan secara simultan, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Pemerintah daerah perlu merancang sistem perencanaan yang lebih strategis dan berbasis data. Dalam menyusun anggaran penting untuk melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat agar alokasi dana dapat difokuskan pada program-program yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, sebagian besar DAU dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu DAK, sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. *1*(April), 43–50.
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus fisik, dan dana desa terhadap kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal. *Jurnalku*, *3*(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Bagus Santoso, A., & Setyowati, E. (2023). Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017–2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *21*(2), 92–102. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i2.1831>
- Balqis, R., & Suriani, S. (2021). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Conference on Economic and Business Innovation*, *35*, 1–12.
- Claudia, S. (2016). Influence of the General Allocation Fund (GAF) and Special Allocation Fund (SAF) against regional expenditure in North Sulawesi Province. *Jurnal EMBA*, *4*(3), 705–716.
- Dana, P., Umum, A., Alokasi, D., & K., Asli, P. (2014). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Nurul Hidayah & Hari Setiyawati*, *XVIII*(01), 45–58.

- Fahrizal, M. A., & Sukartini, N. M. (2024). Flypaper effect dana otonomi khusus dan dana JIMEA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 1203–1214.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2010–2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Kurniawan, D. (2018). Kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. *Gema Eksos*, 5(1), 1–18.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(3), 247–261. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274>
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi pengalokasian dana alokasi umum dalam urusan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 5(2), 129–144. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/418/246>
- Novita, O., Islami, N., Pd, S., & Pd, M. (2022). Modul ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan.
- Nurrizqi, F. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. (2023). Pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017–2019. 3(2), 148–163.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening tahun 2015–2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Rasu, K. J., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. (2019). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Semarang, K., & Tengah, J. (2024). Dampak desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia: Sebuah literature review. *Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang*, 2(3), 1–5.

- Sinaga, H. E. N., Izza, S. N., Siahaan, T., & Simangunsong, Y. S. (2023). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 412–420. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.677>
- Syahidin, S., & Jalil, M. A. (2020). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Triyulianto, T., Syafa, B., Nurvita, R., Stia, P., Jakarta, L. A. N., Kemiskinan, T., Realisasi, P., Alokasi, D., Khusus, D. A., & Sosial, B. B. (2018). Pengaruh realisasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja bantuan sosial dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan.
- Ussa'diyah, N., & Nofrian, F. (2023). *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 2(1), 56–76.
- Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota: Studi kasus Indonesia pada 2010–2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>